

Judul : Kunjungan ke Sultra: Komisi III soroti tambang ilegal
Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kunjungan Ke Sultra Komisi III Soroti Tambang Ilegal



Aboe Bakar Alhabsyi

PRAKTIK tambang ilegal dan penyalahgunaan narkoba jadi persoalan besar yang ditemukan Komisi III DPR dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (8/10/2025).

Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta komitmen serius semua pihak mengatasi masalah tersebut.

Menurut Aboe, dua persoalan ini saling berkaitan, dan dalam penanganannya perlu ada antar-penagak hukum. Dua persoalan ini harus ditangani tegas dan transparan, sehingga potensi Sultra yang kaya akan sumber daya alam bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.

"Sultra ini dunia tambang. Karena itu, perlu perhatian khusus agar uang negara bisa kembali kepada negara dengan baik, tidak ada yang ilegal-ilegal," ujar Aboe dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dia menjelaskan, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk meninjau langsung langkah-langkah penegakan hukum di daerah. Dalam pertemuan bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sultra, Aboe menyampaikan apresiasi atas komitmen kepolisian dalam menindak tegas praktik pertambangan ilegal.

"Kapolda menyampaikan komitmen yang tegas dan jelas untuk menyelesaikan masalah pertambangan ilegal dengan

sebaik-baiknya," terang legislator dari Fraksi PKS itu.

Dia juga menyoroti penyalahgunaan narkoba yang masih marak di daerah-daerah pertambangan. Peredaran narkoba sering kali mengikuti aktivitas tambang yang padat pekerja dan rawan penyimpangan sosial.

"Masalah narkoba ini juga harus jadi perhatian. Di mana ada dunia tambang, di situ ada narkoba. Karena itu, aparat dan Badan Narkotika Nasional perlu bekerja lebih keras lagi," tegasnya.

Komisi III, lanjut Aboe, akan terus mengawasi dan memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik, adil, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Sinergi antarlembaga penegak hukum merupakan kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal dan narkoba.

"Kami akan memastikan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain berjalan efektif," ucapnya.

Senada, anggota Komisi III DPR Hince Panjaitan menegaskan pentingnya komitmen Pemda dan penegak hukum dalam memberantas dua persoalan tersebut. Kedua isu ini menyangkut masa depan daerah dan generasi muda. Penanganannya tidak boleh setengah-setengah, serta harus lebih terarah dan berkelanjutan.

Hince mengungkapkan, terdapat sejumlah perusahaan yang izinnya telah dicabut, namun masih melakukan aktivitas di lapangan. Terkait masalah itu, DPR, Pemda dan penegak hukum telah sepakat untuk memanggil ulang perusahaan-perusahaan yang mendapat sorotan.

Selanjutnya, dia mendorong agar pengelolaan hasil tambang agar daerah penghasil bisa adil, sehingga manfaat ekonomi yang lebih besar bisa diperoleh.

"Kita harus pastikan hasil tambang memberi nilai tambah bagi daerah. Jangan hanya diambil tanpa ada dampak nyata bagi warga," ujarnya. ■ PYB